



► BANTUAN SUBSIDI UPAH

332.472 Pekerja di DIY Penuhi Syarat

JOGJA—BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta mencatat di wilayah DIY ada 332.472 potensi pekerja yang memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp600.000.

Para pekerja tersebut tersebar di Kota Jogja yang mencakup 176.000 pekerja, Kulonprogo 14.200 pekerja, Bantul 42.172 pekerja, Sleman 76.900 pekerja, dan Gunungkidul 23.200 pekerja.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta, Rudi Susanto, mengimbau kepada 332.472 pekerja yang memenuhi syarat untuk segera memperbarui data melalui aplikasi *JMO*. Menurutnya terjadi lonjakan pengunjung di kantor BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta dalam beberapa hari terakhir.

Para pekerja dan perwakilan perusahaan berbondong-bondong datang untuk memastikan informasi seputar BSU dan mencari solusi atas kendala pembaruan data. Lonjakan kunjungan ini terjadi setelah pengumuman pemerintah terkait kebijakan BSU.

"Jadi pekerja atau perusahaan memang mesti melakukan update

Jadi pekerja atau perusahaan memang mesti melakukan update data kepesertaan, guna memastikan validitas datanya.

Rudi Susanto

Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Yogyakarta

data kepesertaan, guna memastikan validitas datanya," ujarnya pekan lalu.

Ia menjelaskan kriteria penerima BSU adalah pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, tercatat aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada April 2025, tidak sedang menerima bantuan PKH, bukan anggota TNI dan Polri serta aparatur sipil negara (ASN).

Menurutnya BSU akan ditransfer ke rekening pekerja lewat Bank Himbara

yakni Mandiri, BNI, BRI, dan BTN dan/atau BSI. Oleh karena itu perlu dilakukan update data sehingga terbaca sebagai calon penerima BSU yang akan disampaikan ke Kemenaker.

Dia mengatakan BPJS Ketenagakerjaan hanya bertugas menyiapkan data. Penentuan akhir penerima BSU sepenuhnya berada di tangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Data dari BPJS Ketenagakerjaan akan dicek ulang dan disandingkan dengan data penerima program bantuan lain dari pemerintah untuk menghindari tumpang tindih bantuan.

"Sebenarnya tidak perlu ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Begitu pengkinian data di aplikasi, dan pengurus perusahaan men-*submit*, datanya langsung muncul dan akan kami teruskan ke Kemenaker," lanjutnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng-DIY, Hesnypta menyampaikan dukungan penuh terhadap program BSU 2025. "Merupakan program keempat kalinya diberikan pemerintah untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat, khususnya pekerja."

(Anisatul Umah)